

Wacana “Nepotisme” Politik Dalam Isi Konten Kampanye Politik di Media Sosial Instagram @aniesindo Periode Pasca Pilpres Sampai Penetapan Melalui Pendekatan Hermeneutika Mendalam John B. Thompson

Fajar Ali Saputra

Fajaralisaputra37@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana "nepotisme" politik dalam isi konten kampanye pada akun Instagram @aniesindo dalam periode pasca Pilpres hingga penetapan hasil Pilpres, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika mendalam John B. Thompson. Dalam konteks politik Indonesia, nepotisme sering menjadi isu krusial yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan integritas dan transparansi para kandidat. Analisis hermeneutika mendalam Thompson digunakan untuk memahami makna tersembunyi serta mengungkap konstruksi ideologi yang muncul dalam pesan-pesan politik yang diunggah. Metode ini juga membantu menyoroti bagaimana simbol dan narasi tentang nepotisme dimanipulasi atau disampaikan dalam konten sebagai bentuk persuasi politik kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola retorika dan penyajian visual yang berupaya membentuk persepsi publik mengenai praktik nepotisme dalam politik, yang sering kali dikaitkan dengan legitimasi dan moralitas kandidat tertentu. Wacana ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam kampanye politik digital, yang juga berpotensi memengaruhi preferensi pemilih. Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi komunikasi politik dengan mengeksplorasi bagaimana isu nepotisme dibingkai dalam media sosial sebagai strategi kampanye, serta bagaimana dampaknya terhadap opini publik di era media digital.

Kata Kunci : Internet, Media Sosial, Politik, Nepotisme

Abstract

This study aims to analyze the discourse of political "nepotism" in the content of campaign content on @aniesindo Instagram accounts in the post-Presidential Election period until the determination of the results of the Presidential Election, using John B. Thompson's in-depth hermeneutic approach. In the context of Indonesian politics, nepotism is often a crucial issue that is questioned by the public related to the integrity and transparency of candidates. Thompson's in-depth hermeneutic analysis is used to understand hidden meanings as well as uncover ideological constructions that emerge in political messages that are uploaded. This method also helps to highlight how symbols and narratives about nepotism are manipulated or conveyed in content as a form of political persuasion to the public. The results show that there are patterns of rhetoric and visual presentation that seek to shape public perception of the practice of nepotism in politics, which is often associated with the legitimacy and morality of a particular candidate. This discourse reflects the dynamics of power and influence in digital political campaigns, which also has the potential to influence voter preferences. This research contributes to the study of political communication by exploring how the issue of nepotism is framed in social media as a campaign strategy, as well as how it affects public opinion in the digital media era.

Keywords : Internet, Social Media, Politics, Nepotism

PENDAHULUAN

Internet berkembang hampir diseluruh dunia, menjadikan internet sebagai kebutuhan yang harus dimiliki oleh hampir sebagian masyarakat dunia tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak dan kian masif dilakukan, ini terjadi karena perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga tidak jarang bahwa informasi lebih cepat beredar melalui internet ketimbang televisi, koran, atau majalah. Media sosial yang semula diciptakan untuk mencari relasi pertemanan kini berubah menjadi media informasi dan propaganda.

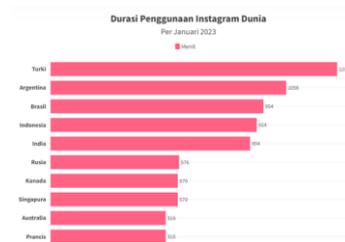
No.	Nama Data	Nilai
1	WhatsApp	90,9
2	Instagram	85,3
3	Facebook	81,6
4	TikTok	73,5
5	Telegram	61,3
6	X (Twitter)	57,5
7	Facebook Messenger	47,9
8	Pinterest	34,2
9	Kuaishou	32,4
10	LinkedIn	25

Gambar 0 1 : data pengguna media sosial (katadata)

Dari data diatas yang dipublikasikan oleh We Are Social pada Januari 2024 tampak instagram menduduki posisi kedua sebagai media sosial paling banyak digunakan dengan angka 85,3% sedangkan diposisi pertama masih ditempati oleh WhatsApp dengan angka 90,9% urutan terakhir ditempati oleh LinkedIn dengan angka 25%. Dari data diatas Instagram masih menjadi yang teratas maka akan sangat wajar apabila

hampir disemua bidang memanfaatkan instagram sebagai branding.

Masyarakat indonesia menjadi salah satu yang terbesar didunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta dan pengguna internet aktif sebesar 130an juta orang. Jumlah itu hampir mewakili setengah populasi warga Indonesia yang bermain media sosial.



Gambar 0 2 : Data pengguna aktif instagram (sumber : goodstat.id)

Data diatas menunjukkan bahwa warga indonesia yang aktif memainkan media sosial instagram berada di nomor 4, dengan menghabiskan 924 menit setiap bulannya. Diatas Indonesia masih ada negara sepak bola brasil, warga brasil menghabiskan waktu bermain media sosial instagram dengan rata-rata 954 menit setiap bulannya. Sedangkan diposisi pertama ditempati oleh Turki dengan 1284 menit setiap bulannya.

Dalam teropong politik Indonesia, wacana Nepotisme Politik kerap muncul sebagai salah satu isu krusial yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan demokrasi. Akun instagram @aniesindo menjadi kanal diskusi yang produktif dalam membangun narasi kritis. Salah satu yang menarik adalah

bagaimana wacana Nepotisme Politik dikaitkan dengan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sorotan tajam mengarah kepada pasangan tersebut, setelah Gibran dicalonkan mengingat posisinya sebagai putra Presiden Jokowi. Akun @aniesindo aktif mengkritik narasi wacana Nepotisme Politik bisa menjadi pintu masuk untuk membedah persoalan lebih mendalam. Pilkada Jakarta menjadi arena politik yang menarik, pengaruh pilpres 2024 masih kian terasa. Perebutan hegemoni kekuasaan masih menjadi topik yang dominan menjelang penetapan calon Gubernur dan wakil Gubernur. Terlebih ini adalah panggung politik terakhir bagi Anies Baswedan jika tidak ingin terlempar dari pusran kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Wacana “Nepotisme” Politik Dalam Isi Konten Kampanye Politik di Media Sosial Instagram @aniesindo Periode Pasca Pilpres Sampai Penetapan Melalui Pendekatan Hermeneutika Mendalam John B. Thompson?

1.3 Tujuan Penelitian

Memberikan hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak dari respon publik terhadap wacana nepotisme politik yang disebarakan melalui media sosial instagram serta menjelaskan konsep nepotisme politik yang diangkat dan dibahas dalam konten kampanye politik

yang diposting akun instagram @aniesindo.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Wacana “Nepotisme” Politik Dalam Isi Konten Kampanye Politik di Media Sosial Instagram @aniesindo Periode Pasca Pilpres Sampai Penetapan Melalui Pendekatan Hermeneutika Mendalam John B. Thompson?

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang akan digunakan¹. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.²

Kerangka Teori

1) Nepotisme Politik

Dalam konteks politik Nepotisme dipandang sebagai suatuagalnya dalam sistem demokrasi, dimana penyalahgunaan kekuasaan mungkin

¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2019). Hal. 2

² Nazar, Bakry. Tuntutan Praktis Metode Penelitian. (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994). Hal. 2.

terjadi. Tujuan dari Nepotisme adalah untuk mengawetkan kekuasaan politik dan penguasaan pada ekonomi, sehingga dalam praktiknya didominasi oleh keluarga atau kerabat terdekat. Praktik nepotisme sudah terjadi diberbagai level pemerintahan, baik di daerah atau pun nasional. Namun sebagaimana masyarakat seakanitu adalah “pemakluman” sehingga Nepotisme di Indonesia masih sangat subur. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia bukan lagi sebuah fenomena melainkan sebuah fakta yang terkenal dimana-mana³. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk sebagai ekspresi dari gejala penyimpangan kekuasaan, ketiga tindakan kejahatan itu bukan hal baru yang dipersoalkan oleh rakyat melalui wacana publik di Indonesia⁴

2) Wacana

Wacana menurut John B. Thompson adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari komunikasi massa, itu dikarenakan bahwa wacana dapat dipahami sebagai struktur komunikasi yang dibentuk dalam interaksi sosial. Wacana juga tidak hanya sebagai menyampaikan informasi tetapi untuk membentuk dan merekonstruksi realitas sosial. Salah satu karakteristik

komunikasi massa ialah meluaskan bentuk-bentuk simbol dalam ruang dan waktu.⁵

3) Hermeneutika Mendalam

Secara etimologis kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menjelaskan, menerjemahkan, dan mengekspresikan.⁶ Hermeneutika dapat digunakan untuk menganalisa ideologi dan komunikasi massa.⁷ Hermeneutika Mendalam ialah sebuah pendekatan interpretatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap teks, simbol, atau fenomena sosial untuk memahami makna tersembunyi dibalik konteks sosial, budaya, dan politik. Bentuk-bentuk simbol adalah konstruksi makna yang harus diinterpretasikan, dapat berupa ucapan, teks, yang terkonstruksi makna dapat dipahami.⁸

Thompson berpendapat bahwa berbagai jenis analisa formal sangat layak dan vital bagi analisa sosial pada umumnya. Hermeneutika adalah suatu topik yang menarik dalam filsafat, terutama dalam

³ Fathurrahman Djamil dkk, “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) : Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam” : dalam menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia . Yogyakarta : Aditya Media, 1999. Hlm (103-115), 103

⁴ Lay, Cornelis. Involusi Politik Esei-Esei Transisi Indonesia. Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada. 2006. Hal, 250

⁵ John B. Thompson. Kritik Ideologi Global./John B. Thompson : Penerjemah Haqqul Yaqin : Penyunting, Endang Hertatik, Cetakan-1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2015 hal 303

⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Kanisuis Yogyakarta, 1993, hal, 23

⁷ John B. Thompson. Kritik Ideologi Global./John B. Thompson : Penerjemah Haqqul Yaqin : Penyunting, Endang Hertatik, Cetakan-1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2015 hal 371

⁸ John B. Thompson. Kritik Ideologi Global./John B. Thompson : Penerjemah Haqqul Yaqin : Penyunting, Endang Hertatik, Cetakan-1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2015 hal 373

“perjalanan” dan perkembangan filsafat serta menjadikannya sebagai sesuatu yang terus digali, diperbaharui kendati demikian topik itu telah tua.⁹

Kajian Teoritis

Komunikasi Politik

Dalam perkembangan dunia ilmu komunikasi, tidak jarang komunikasi menjadi suatu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah. Menjadikan komunikasi ilmu yang beririsan atau berdampingan dengan ilmu politik, dalam dunia politik seringkali para pelaku politik melakukan propaganda-propaganda untuk menarik simpati masyarakat. Sejumlah ilmuwan komunikasi menyebut bahwa komunikasi mencakupi politik, maka sebaliknya para ilmuwan politik memandang bahwa sesungguhnya “politik meliputi komunikasi” karena banyak definisi komunikasi yang telah ternoda oleh politik atau mengandung makna politik.¹⁰

New Media

Teori new media adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy teori ini menjelaskan perkembangan media, namun terdapat dua pandangan mengenai teori tersebut. Pertama adalah pandangan interaksi sosial yang membedakannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy

berpendapat jika World Wide Web atau (WWW) adalah lingkungan informasi yang fleksibel dan terbuka serta dinamis manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang baru.

Analisis Wacana

Dalam pengertian lain wacana adalah, rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain sehingga membentuk satu kesatuan¹¹. Jika dikaji lebih mendalam dapat dipahami bahwa analisis wacana adalah cara yang digunakan untuk memberitahu makna yang terdapat pada pesan komunikasi, dimana didalamnya terdapat sebuah teks secara tekstual dan kontekstual. Sehingga makna yang digali dari sebuah teks atau pesan komunikasi tidak hanya dilihat dari teks yang sudah jelas tertulis semata lebih dari itu¹².

Nepotisme Politik

Dalam konteks politik Nepotisme dipandang sebagai suatu gagalnya dalam sistem demokrasi, dimana penyalahgunaan kekuasaan mungkin terjadi. Tujuan dari Nepotisme adalah untuk mengawetkan kekuasaan politik dan penguasaan pada ekomoni, sehingga dalam praktiknya didominasi oleh keluarga atau kerabat terdekat.

⁹ Masykur Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, Yogyakarta, Lkis, 2015, hal VI (6)

¹⁰ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Yogyakarta : Graha ilmu ,2011) hal 6

¹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Jogjakarta : LkiS, 2006), cetakan ke-5, hlm 3

¹² Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta : LkiS 2007) hlm 170

Konteks Sosial-Historis

Dalam bukunya John B. Thompson mengembangkan konsep Hermeneutika, yakni dalam konteks sosial-historis kita dapat mengupayakan mengidentifikasi dan menjelaskan setting ruang dan waktu yang menjadi tempat diproduksi dan diterimanya bentuk-bentuk simbol. Bentuk-bentuk simbol seperti ucapan, peran, atau tulisan oleh individu yang berada dilokasi tertentu. Kemudian melakukan aksi dan reaksi dalam waktu dan tempat tertentu dan merekonstruksi bagian penting dalam analisa sosial-historis.

Analisa Interpretatif Wacana

Dalam fase ini adalah untuk mempelajari bentuk-bentuk simbol sebagai konstruksi simbol yang kompleks dan menunjukkan struktur artikulasinya. Ini penting karena merupakan fenomena sosial yang contextualized dan sesuatu yang lebih. Ini merupakan konstruksi simbolik yang melalui ciri-ciri strukturalnya, yang merupakan ciri-ciri strukturalnya mampu dan mengklaim merepresentasikan sesuatu, menyimbolkan sesuatu dan menyatakan sesuatu tentang sesuatu.

Konteks

Analisa Reinterpretatif

Dengan demikian bentuk-bentuk simbol yang menjadi objek interpretatif merupakan bagian dari pra tafsir, yakni sudah ditafsirkan oleh subjek yang membangun dunia sosial-historis.

Menurut John B. Thompson kita akan dapat melihat perbedaan jika kita telah dapat memahaminya melalui hermeneutika sehari-hari, yakni suatu cara dimana bentuk-bentuk simbol dipahami secara rutin dan terus menerus. Bentuk-bentuk simbol yang dianalisa lebih lanjut hubungannya dengan kondisi sosial-historis dan ciri-ciri struktur internalnya, dengan hal itu berarti dapat diinterpretasi.

OBJEK DESKRIPSI PENELITIAN

A. Instagram

Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan, secara prinsipnya, aplikasi tersebut hanyalah sebuah platform yang menyediakan tempat untuk berbagi foto dan video serta mengekspresikan kehidupan penggunaannya. Seiring berkembangnya zaman intstagram sudah bergeser mengarah kepada kebutuhan informasi, banyak media besar yang pada akhirnya menggunakan isntagram untuk keperluan jurnalistik. Dalam konteks pemilu, instagram bisa dikatakan sebagai gerakan politik untuk mendongkrak pasangan calon.



Gambar 03. Profil ig @aniesindo

Seperti akun pendukung Anies Baswedan yakni @aniesindo akun tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 112 ribu, adanya akun itu untuk menyebarkan rekam jejak mantan kontestan pilpres 2024 kepada khalayak. Akun isntagram tersebut dibuat oleh relawan Anies untuk Pemilihan Presiden 2024. Akun itu dikelola oleh simpatisan pendukung Anies Baswedan, akun semacam itu bertujuan untuk menyebarkan opini, penyebaran informasi, dan sebagai mobilisasi makna dan dukungan. Konten-konten yang muncul pada akun itu lebih banyak dan didominasi oleh wacana politik Anies kemudian pasca penetapan Gubernur Jakarta akun itu hanya menampilkan berita-berita politik secara umum. Komentar yang muncul bisa beragam namun sebagian besar adalah pendukung, pengagum atau pemilih Anies di Pilpres 2024.

B. Sorotan Instagram

Dalam menu instagram terdapat fitur seperti sorotan atau *highlights*, bertujuan untuk mendokumentasikan rangkaian kegiatan kampanye atau momen-momen penting yang berlangsung selama masa kampanye. Sorotan instagram akun @aaniesindo lebih banyak memuat wacana anies dan untuk me-repost atau mengunggah ulang bagi pengikut

@aniesindo dengan cara menandai @aniesindo di instastory pengguna akun lain.

C. Reels Instagram

Pada fitur reels @aniesindo memanfaatkan dengan mengunggah video pendek yang berisikan wacana politik Anies Baswedan tentang kondisi yang sedang terjadi, seperti adanya kebocoran data kominfo yang sudah diprediksi Anies sebelumnya di debat Presiden yang lalu.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap wacana-wacana yang diunggah di akun media sosial instagram @aniesindo peneliti menggunakan analisis wacana John B. Thompson. Penggunaan teori tersebut membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana wacana Nepotisme politik dalam isi konten kampanye politik di media sosial instagram @aniesindo. Tiga teori konteks yang ditekankan adalah, Konteks sosial-historis, konteks interpretasi wacana, dan re-interpretasi wacana.

Wacana yang dikembangkan melalui media sosial tersebut adalah berusaha untuk memobilisasi makna, Nepotisme seringkali dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengkritik Prabowo-Gibran. Relawan atau simpatisan Anies serempak menggunakan isu dinasti politik sebagai senjata utama untuk menjatuhkan Prabowo

dan Gibran. Isu dinasti politik bisa jadi tidak relevan karena dalam koalisi perubahan yang di identikan dengan anti dinasti justru mempraktikkan dinasti pada level daerah. Lebih jauh lagi Anies yang dicap sebagai politikus sayap kanan tentunya membawa kepentingan politiknya sendiri. Sayap kanan adalah istilah yang mengacu pada segmen politik yang dikaitkan dengan konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan politik sayap kiri.¹³

Pada unggahan @aniesindo memunculkan potongan video podcast seorang komedian Pandji Pragiwaksono yang menyampaikan opininya bersama Kemal Pahlevi, dalam podcast itu Pandji menyinggung praktik Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Termasuk pengangkatan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia yang tidak melalui proses demokratis, disertai pembagian bantuan sosial yang mengandung kepentingan elektoral politik. Secara interpretasi wacana Pandji Pragiwaksono dikenal sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan, yang pada saat itu menjadi calon Gubernur Jakarta 2017. Pernyataan Pandji dalam podcast itu mengkritik dinasti politik, hal ini mendapatkan perhatian khusus karena hubungan kedekatannya dengan Anies yang berperan mengangkat isu-isu dinasti

politik. Di satu sisi kritik tersebut menjadi serangan kepada pemerintahan Jokowi yang sering dikaitkan dengan dinasti politik. Namun penting untuk mengkritisi konsistensi dari kritik tersebut, mengingat bahwa dinasti politik bukan hanya isu yang terhubung pada pemerintahan Jokowi semata.

Wacana selanjutnya adalah saat Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 resmi mengubah aturan Pilkada Serentak 2024. Terjadi perdebatan yang menyebabkan bahwa sebelum hari pemungutan suara negara ini sudah curang dengan memasang ambang batas pada pencalonan Presiden atau pencalonan kepala daerah. Pengamat Politik seperti Rocky Gerung menilai jika ambang batas sebagai bentuk manipulasi politik yang menguntungkan oligarki. Ambang batas sering kali digunakan untuk transaksional politik antar kepentingan untuk membangun koalisi.

Selain itu, partai-partai kecil atau partai baru sulit mengajukan calonnya karena harus berkoalisi dengan partai besar. Padahal dalam demokrasi setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk bersaing, namun adanya ambang batas yang pada saat itu belum diturunkan terjadi ketimpangan antara partai besar dan kecil. Ambang batas ini menjadi masalah karena acapkali calon-calon alternatif dengan ide dan gagasan yang segar bisa dipinggirkan karena tidak mampu dalam memenuhi

¹³ Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/02000041/siapa-yang-dimaksud-dengan-sayap-kanan-dan-kiri-dalam-politik?page=all> pada 19 November 2024

syarat administrasi. Pada intinya adanya ambang batas yang tinggi membuat adanya kecurangan demokrasi terselubung, itu karena membatasi partisipasi, memperkuat oligarki, yang tentunya mendorong praktik politik transaksional.

Secara interpretasi wacana, Wacana diatas berfokus kepada perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait aturan atau UU Pilkada. Perubahan itu menantang struktur kekuasaan oligarki yang selama ini dianggap dilanggengkan oleh ambang batas. Meski berlaku untuk level daerah setidaknya telah terjadi dinamika politik di Indonesia. terdapat adanya ketegangan antara tuntutan reformasi dengan mempertahankan kekuasaan oligarki. Itu dapat dilihat dari respon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kepentingan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Masyarakat yang berunjuk rasa seakan kembali pada tuntutan reformasi.

Peringatan Darurat & #KawalPutusanMK, dalam konteks sosial historis Perebutan hegemoni kekuasaan terjadi antara kekuasaan dan demokrasi, Indonesia memiliki sejarah panjang menuju demokrasi yang terbuka terhadap perbedaan. Dimulai dari orba hingga reformasi, negara ini harus mengawasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak menguntungkan kelompok elit. Dalam konteks ambang batas misalnya, itu bukan

hanya merupakan isu administrasi melainkan lebih sebagai strategi untuk mengatur ulang kekuasaan, karena ambang batas sering kali menyuburkan politik transaksional. Perebutan kepentingan antara oligarki dengan kaum pro demokrasi berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi mengetok palu untuk perubahan aturan. Akan sangat mungkin meski pun pada level daerah sebelum aturan dirubah, oligarki bermain dan melakukan politik transaksional. Dalam pandangan Interpretasi wacana, Wacana tersebut muncul dari situasi kritis yang alami oleh masyarakat Indonesia terhadap putusan MK yang seringkali dianggap memiliki dampak yang signifikan kepada perubahan suhu politik dan hukum di Indonesia. “Peringatan Darurat” dalam konteks ini mengacu kepada persepsi bahwa demokrasi dan hukum di indonesia sedang tidak baik-baik saja atau sedang mengalami ancaman setelah keluarnya putusan MK. Munculnya tagar #KawalPutusanMK adalah sebagai bentuk ketidakpastian mengenai putusan MK yang akan dianulir oleh DPR. “Peringatan Darurat” dan #KawalPutusanMK adalah simbol pesan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas akan kondisi politik yang terjadi.

Terkait dengan Peringatan Darurat setelah putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, terjadi situasi politik yang cukup genting. Lewat kedua simbol itu

masyarakat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah dengan putusan MK agar apa yang sudah diputuskan secara final dan mengikat tetap berada dijalurnya yakni adil dan konstitusional. MK dianggap sebagai harapan baru setelah keluarnya putusan yang baru publik tidak percaya dengan proses politik yang terjadi di senayan. Dalam era digital sekarang ini masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk narasi, memberikan tekanan, dan bahkan mengarahkan pada isu-isu tertentu dengan alat-alat komunikasi.

Konteks Reinterpretasi Wacana :

Kondisi politik Indonesia terus diwarnai dengan berbagai peristiwa salah satunya adalah putusan MK yang hendak dianulir oleh DPR. DPR terkesan seperti cepat sekali dalam merespon putusan MK namun tidak dengan isu-isu yang lain. Publik menilai bahwa ada yang janggal dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Masyarakat sipil melakukan perlawanan dengan menggunakan simbol yakni gambar garuda biru disertai dengan tagar #KawalPutusanMK tagar itu menjadi trending hingga beberapa hari disosial media. Menunjukkan bahwa terdapat adanya tekanan publik terhadap DPR menjadi besar.

Publik terbagi menjadi tiga yakni yang pertama adalah publik datang langsung berdemonstrasi untuk menuntut agar DPR tidak menganulir Putusan MK yang sudah final. Sedangkan publik yang kedua adalah

publik dunia maya, memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menaikan tagar #KawalPutusanMK dan membuat narasi penolakan terhadap langkah DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah publik yang marah dengan pihak yang pada Pilpres lalu mencoblos 02 namun ikut-ikutan menolak anulir putusan MK. Fenomena politik itu terjadi sebelum penetapan calon Gubernur Jakarta, dimana Anies tidak memiliki daya tawar lagi setelah ditinggal oleh 3 partai pengusungnya yakni Nasdem, PKS, dan PKB.

Kesimpulan & Saran

a) Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang lakukan oleh penulis, terhadap analisis wacana Nepotisme Politik pada akun instagram @aniesindo melalui dimensi konteks sosial-historis, konteks interpretasi wacana, dan reinterpretasi. Terdapat wacana Anies mengenai Nepotisme Politik pada akun instagram @aniesindo yang disisipkan. Dengan menggunakan Hermeneutika mendalam John B. Thompson, konten visual dan teks dilihat dalam konteks simbolisme dan pesan tersembunyi yang mereka bawa. Setiap dimensi memiliki unsur untuk membantu menganalisis wacana dalam akun instagram @aniesindo.

Pertama pada bagian konteks sosial-historis, dalam konteks ini penulis berupaya mengidentifikasi dan

menjelaskan setting ruang dan waktu tertentu atau merekonstruksi munculnya sebuah wacana tersebut. Wacana-wacana yang diproduksi oleh akun @aniesindo didasarkan pada kondisi yang sedang terjadi yakni dalam konteks pemilu. Wacana Anies mengenai Nepotisme Politik yang kerap dipermasalahkan saat Pilpres menjadi topik yang diulas secara mendalam. Wacana Anies mengenai Nepotisme Politik murni karena kepentingan kelompok dibelakang Anies yang ingin berkuasa atau kelompok yang selama pemerintahan Jokowi terpinggirkan. Anies sering menyerang Prabowo yang dianggap memanfaatkan dinasti politik dan Nepotisme Politik untuk kepentingan kekuasaan, Anies lupa bahwa saat Pilkada Jakarta 2017 Anies pun memanfaatkan kelompok Islam radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) untuk melancarkan serangan ke Ahok.

Anies memanfaatkan situasi politik SARA untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2017 lalu. Soal kritik terhadap Prabowo, Presiden Prabowo sejatinya pernah membantu Anies dalam merebut posisi Gubernur pada 2017 silam. Anies yang baru kena Reshuffel di kabinet Kerja Jokowi periode pertama yakni 2014-2019 mendatangi Prabowo dan bersama-sama melawan pemerintah yang berkuasa dengan diwakilkan Ahok. Setidaknya itu pernah diungkapkan Prabowo saat debat capres yang pertama.

Penelitian ini menemukan bahwa konten kampanye politik @aniesindo dibentuk oleh realitas konteks politik dan sosial di Indonesia. Praktik Nepotisme dalam politik sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, konten-konten kampanye itu memperlihatkan simbol-simbol kekuasaan yang hendak diwariskan. Konten yang diunggah oleh akun @aniesindo menekankan hubungan dekat dengan tokoh politik terkenal. Dalam konteks pasca Pilpres wacana tersebut menegaskan bahwa kekuatan politik dapat dilanjutkan dan diwariskan.

Kedua, dimensi interpretasi ini berusaha untuk mengungkap wacana yang memuat makna tersirat yang mencerminkan ideologi tertentu. Pada dimensi konteks interpretasi wacana pada dimensi ini penulis mengungkapkan bagaimana konten yang diunggah dalam akun @aniesindo yang berisikan pesan politik secara implisit terkait dengan Nepotisme. Meskipun istilah “Nepotisme” tidak secara eksplisit, namun narasi yang dibangun menunjukkan kekuasaan, dan legitimasi kandidat yang terjalin dalam lingkaran politik keluarga atau elit. Wacana Nepotisme yang unggah tentu dengan agenda politik tertentu.

Ketiga, konteks reinterpretasi pada konteks ini penulis berfokus untuk menfasirkan kembali wacana Nepotisme yang disampaikan di akun @aniesindo. Reinterpretasi yang dilakukan tentunya

dengan pertimbangan memperhatikan wacana yang akan ditafsirkan. Penulis menginterpretasikan wacana dengan memperhatikan dimensi sosial-historis dan dimensi konteks interpretasi wacana.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

Pendekatan hermeneutika mendalam John B. Thompson memberikan yang mendalam terhadap sebuah teks wacana, serta membuka cara pandang dalam menilai sebuah wacana yang diproduksi media tertentu. Masyarakat perlu meningkatkan kemauan literasi sehingga melahirkan kemampuan menafsirkan dan memahami pesan-pesan politik dengan kritis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam dengan menggunakan hermeneutika mendalam mengenai Korupsi. Korupsi masih menjadi wacana yang sering muncul dimedia, korupsi juga termasuk dalam katerori KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin, 2011. *Komunikasi Politik* (Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Aziz, M. (2021). *Demokrasi Prosedural dan Tantangan Partisipasi Politik*. Jakarta:Gramedia.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana Toeri, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Cook, Guy. 1989. *Discourse*. (Oxford : Oxford University) Press.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : PT LkiS Printing Cemerlang.
- Faturrahman Djamil dkk, 1999. “*Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*” : dalam *menyikap Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- John B. Thompson. 2015. *Kritik Ideologi Global*. John B. Thompson : Penerjemah Haqqul Yaqin : Penyunting, Endang Hartatik-cetakan 1-Yogyakarta : IRCiSoD
- Lay, Cornelis. 2006. *Involusi Politik Esei-Esei Transisi Indonesia*. Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otomoni Daerah Universitas Gadjah Mada.
- M. Dwam Raharjo ,” *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN : Kajian Konseptual dan Sosio-kultural*” : Menyikap Korupsi Op.Cit

Novi Herliana, 2017. *“Efektivitas Komunikasi Akun Instagram @sumbar_rancak Sebagai Media Informasi Online Pariwisata Sumatera Barat”*. Jurnal Risalah Vol.4, No.2

Rachmat Krisyantoro, Ph.D. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi, Pemasaran*. (Jakarta : Kencana)

Syamsuddin dan Rohana. *“tanpa tahun”*. *Analisis Wacana*. CV. Samudra Alif-Mim

Sumaryono, E. 1993. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Kanisuis Yogyakarta

Wahid, Masykur. 2015. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. LkiS. Yogyakarta.